

Kebijaksanaan kelembagaan dalam rangka optimalisasi pelayanan kebersihan: studi banding Kotamadya DT II Bandung dan Kotamadya DT II Semarang

Endang Wirjatmi Tri Lestari

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=80829&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembahasan pelayanan kebersihan khususnya pelayanan persampahan di wilayah perkotaan merupakan bagian dari pelayanan publik yang terkait dengan upaya pemeliharaan kebersihan, kesehatan, keindahan. Pelaksanaannya berbeda dan ditentukan oleh luas dan fungsi kota, penduduk dan kepadatannya, corak kelembagaan dan peran serta masyarakat.

Dengan bentuk kelembagaan pengelolaan sampah yang berbeda, maka penelitian ini dilakukan melalui studi banding antara Kotamadya DT II Semarang dan Kotamadya DT II Bandung, yang kedua-duanya merupakan ibu kota Propinsi dan pernah meraih Adipura sebagai kota terbersih di Indonesia.

Bentuk pelayanan dan corak lembaga berdampak pada pembiayaan yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh volume sampah, luas wilayah, kondisi daerah, fungsi lahan yang terbangun dan teknologi pengelolaannya

Untuk mengetahui kinerja manajemen pelayanan persampahan kota, maka penelitian ini mencakup efektivitas investasi, kinerja pengelolaan, sumber pembiayaan, efektivitas pelayanan dan pemenuhan tuntutan pelayanan kebersihan.

Pengukuran efektivitas dan efisiensi dilakukan melalui indikator-indikator pembiayaan dan sumber pembiayaan; investasi; efisiensi pelayanan persampahan yang diukur pada luas wilayah pelayanan; retribusi yang dikenakan pada masyarakat berdasarkan pricing policy; biaya perkapita pelayanan; biaya tiap ton berat sampah terkelola.

Lembaga pengelolaan di Kotamadya DT II Bandung berbentuk Perusahaan Daerah dan Kotamadya DT II Semarang merupakan Dinas Kebersihan. Keduanya berdampak pada indikator-indikator yang merupakan landasan rekomendasi dari hasil penelitian tesis ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan persampahan kota sulit bersifat menguntungkan (profit center); karena besarnya biaya pengelolaan tidak setara dengan hasil pendapatan retribusi dari masyarakat, maka senantiasa memerlukan subsidi pemerintah

Kondisi pelayanan sampah di Kotamadya DT II Bandung menunjukkan indikator bahwa volume sampah, retribusi sampah semakin meningkat dan subsidi pemerintah semakin menurun, perwujudan kebersihan kota semakin meningkat.

Kondisi pelayanan persampahan di Kotamadya DT II Semarang menunjukkan indikasi bahwa volume

sampah yang semakin meningkat, subsidi pemerintah semakin besar, perwujudan kebersihan kota semakin meningkat.

Saran yang diajukan untuk mengurangi beban pemerintah terhadap pelayanan kebersihan adalah pada financial option, technological option, dan peran serta masyarakat yang harus ditingkatkan, guna mencapai peningkatan kebersihan, kesehatan, keindahan dan kenyamanan kota.
